

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANDUNG DALAM MENERAPKAN PEMBATAAN
SOSIAL BERSKALA BESAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA
KESEHATAN**

Oleh

Rapinus Ginting

41151010160227

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***THE MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL
GOVERNMENT'S AUTHORITY TO IMPLEMENT LARGE-
SCALE SOCIAL RESTRICTIONS UNDER THE 2014 LAW
ON MUNICIPAL RULE IS LINKED TO THE NUMBER 6
YEAR 2018 LAW ON HEALTH QUARANTINE***

By

Rapinus Ginting

41151010160227

Final Project

To meet one of of the requirements to obtain law degree a law study program

Specificiity Program: Constitutional Law



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020**

ABSTRAK

Covid19 masuk ke Indonesia pada awal maret kemudian pemerintah mengambil kebijakan psbb sebagai tindak lanjut dalam mengani covid 19 hal ini didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, pemerintah daerah haruslah berkoordinasi terlebih dahulu kepada pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan Psbb, disisi lain pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan asas otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daerah sehingga akan menimbulkan pertanyaan sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan psbb ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Karantina Kesehatan dan bagaimana efektifitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam pencegahan covid 19.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran peraturan yang terkait dengan objek yang akan diteliti.

Mengenai Hasil penelitian ini adalah maka dapat disimpulkan bahwa mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menerapkan PSBB, Meskipun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus daerah otonom sendiri tetapi dalam menerapkan kebijakan psbb haruslah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat karena covid 19 merupakan darurat kesehatan nasional sesuai dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan maka kemenkes yang menjadi komando dalam menerapkan kebijakan psbb. Kebijakan PSBB masih kurang efektif dalam menyelesaikan covid 19 karena bisa dilihat dari peningkatan kasus yang terjadi secara terus menerus, selain faktor lain yang membuat PSBB ini menjadi tidak efektif. Faktor tersebut adalah mobilisasi pergerakan masa, bisa dilihat setiap pekan, tempat-tempat wisata untuk saat ini penuh kembali, dan tentunya akan menimbulkan kerumuman, padahal ini jelas bisa menimbulkan klaster baru. Mobilisasi masa tersebut biasanya datang dari kota lain yang berkunjung ke tempat wisata tertentu, seharusnya ada pengetatan dalam memasuki daerah terutama untuk masyarakat luar yang bisa masuk ke wilayah yang sedang menerapkan psbb. Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang sedang terjadi di dalam masyarakat, PSBB sendiri setidaknya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

ABSTRACT

In the first quarter of Two thousand twenty, the company's vice President director, Thomas kensel, said here on Tuesday that the government would not be able to control the rupiah's movement, he said. In the second quarter of Two thousand seven, there was a change in the number of micro, small and medium micro, small and medium business. The purpose of this study is to know and analyze how a local government official applies the great social restraints of the year six year Two thousand twenty quarantine of health and how a large-scale social limitation policy can be effective in the prevention of covid 19.

The method used in this study is normative-research juridical, a legal research method that is done by examining library or secondary data asa basis for research by means of referencing the regulations associated with the object to be studied.

As to the results of this study, it should be concluded that the local government's authority in implementing PSBB, although the regional government has the authority to manage its own autonomous policies but in implementing the PSBB policy should be coordinated first with the central government since covid 19 is a national health emergency in accordance with the health quarantine act, the ministry that commands the PSBB policy. The PSBB policy is still less effective in the covid 19, as can be seen from the continuous increase in cases, as well as other factors that have made the PSBB ineffective. This factor is the mobilisation of the mass movement, seen in weeks, the tourist sites for the now full again, and of course will result in rioting, when this can clearly produce a new cluster. The mobilisation of the time would normally come from other cities visiting certain tourist areas, and especially for outside people to enter areas that are already applying PSBB. Large scale social restrictions aimed at preventing the spread of current diseases in society, PSBB itself would include at least school and workplace protection, restrictions on religious activities, and restrictions on activities in public places or facilities

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah **“KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENERAPKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA KESEHATAN”**.

Segala iringan doa dan harapan, semoga skripsi ini mempunyai nilai dan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yesus Kristus yang telah melimpahkan karunia dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Hj. Herawati RAS, S.H., M.Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran yang luar biasa, telah bersedia meluangkan waktu, dan mengarahkan penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati kecuali ucapan puji syukur dan terima kasih penulis ucapkan.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar. S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., MT Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana
3. Bapak Ruhanda, S.E.,M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Sri Mulyati Chalil , S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Bapak Rahmat, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
11. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., Selaku Wali Dosen Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

12. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Staf Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat saya yang tergabung dalam grup “para pejuang Dr,S.H.,M.H. (Kiki, Dani, Neng, Leonardo, Gilang, Ririn dan Tami), yang bersama-sama berjuang dan saling menyemangati satu sama lain.
15. Teman seperjuanganku Angkatan 2016 terkhusus buat mahasiswa kelas A4, dan untuk teman-teman KKN tahun 2018/2019 kelompok 33 Suka Wening, selalu berjuang untuk meraih kesuksesan yang kita inginkan.
16. Kepada semua pihak yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dalam menyumbang maupun memberikan masukan atau ide dalam penulisan skripsi ini.

Tidak pernah surut doa untuk kedua orang tua penulis Bapak Rajin Ginting dan Sadarianna Br Barus yang selalu mendukung penulis dalam menyusun penelitian ini dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat yang tinggi-tingginya kepada Saudara-saudara Kakak tercinta, Ika Juni astaria Br Ginting, yang selalu menjadi motivasi hidup penulis dan telah bahu membahu meringankan beban orang tua dalam mendukung penulis untuk menempuh Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis menanti kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang berguna bagi masyarakat khususnya bagi penulis sendiri. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

Bandung, Tanggal Sidang Akhir 20 Oktober 2020

Penulis

Rapinus Ginting

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Identifikasi Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Kegunaan Penelitian.....	
E. Kerangka Penelitian	
F. Metode Penelitian.....	
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR, DAN KARANTINA KESEHATAN	
A. Pemerintah Daerah	
1. Pengertian Pemerintah Daerah	
2. Asas Otonomi Daerah	
3. Dasar hukum Pemerintah Daerah.....	
4. Kewenangan Pemerintah Daerah	
5. Kewenangan Pemerintah Pusat	
B. Teori Kewenangan	
1. Pengertian Kewenangan.....	
2. Sumber Kewenangan	
C. Pembatasan Sosial Berskala Besar	
1. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar.....	
2. Ruang Lingkup Pembatasan Sosial Beskala Besar	
3. Dasar hukum pembatasan sosial berskala besar.....	

D. Cara Penanggulangan Wabah Menurut Undang-Undang Karantina

- Kesehatan
1. Karantina Rumah
 2. Karantina Wilayah
 3. Karantina Rumah sakit

BAB III PELAKSANAAN PENANGGULANGAN PEMBATASAN SOSIAL

BERSKALA BESAR KOTA BANDUNG

- A. Penerapan Kebijakan PSBB di Kota Bandung
- B. Zona Merah atau Kuning corona, Kota Bandung dalam terapkan psbb persial
- C. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

DALAM MENERAPKAN PEMBATASAN SOSIAL BESKALA BESAR

- A. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar
- B. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid 19

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP